

DPR Gelar Rapat Paripurna Sahkan Jenderal Agus Menjadi Panglima TNI

JAKARTA (IM) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, hari ini, Selasa (21/11) DPR akan melaksanakan Rapat Paripurna pengesahan Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI.

"Jadi insya Allah besok DPR RI akan melakukan sidang paripurna terkait Panglima TNI untuk menetapkan atau menyetujui usulan dari presiden terkait penggantian panglima TNI yang akan datang," kata Puan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11).

Sebagai informasi, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono akan memasuki akhir masa tugasnya pada akhir November 2023. Sebab itu, perlu ada pengganti kursi Panglima TNI secepatnya.

"Karena Panglima Bapak Yudo akan mengakhiri masa tugasnya. Kalau sesuai aturan itu sesuai dengan undang-undang yang nantinya kan jatuh pada tanggal 26 (November). Jadi sebelum beliau (Yudo) masuk masa pensiun segera ada pengganti nama calon panglima TNI," kata Puan. Diketahui, Komisi I DPR

RI menyetujui Jenderal TNI Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono. Persetujuan diberikan sembilan fraksi di Komisi I DPR. "Memberikan persetujuan kepada kelengkapan calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI," Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Senin 13 November 2023.

Selain persetujuan terhadap Agus, yang kini menjabat sebagai KSAD, rapat tersebut juga menyetujui pemberhentian dengan hormat kepada Panglima TNI Yudo Margono. Selanjutnya, persetujuan ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pekan depan.

Agus dilantik menjadi KSAD pada 25 Oktober 2023, menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang memasuki masa pensiun. Kurang dari sepekan menjabat KSAD, namanya langsung dicalonkan sebagai calon tunggal Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). • han

Delapan Calon Hakim Agung dan Tiga Hakim Ad Hoc HAM MA Usulan KY

JAKARTA (IM) - Komisi Yudisial (KY) mengusulkan delapan nama calon hakim agung dan tiga nama calon hakim ad hoc HAM Mahkamah Agung (MA) ke Komisi III DPR RI. Usulan disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (20/11).

Ketua KY Amzulian Rifai mengatakan, usulan delapan nama calon hakim agung dan tiga calon hakim ad hoc HAM itu diserahkan usai melakukan setidaknya empat tahapan seleksi.

Seleksi itu meliputi administrasi yang diikuti oleh 70 calon hakim agung dan 30 calon hakim ad hoc HAM MA. Kemudian, seleksi kualitas, seleksi kesehatan-kepribadian, dan wawancara terbuka.

Dari rangkaian seleksi itu, KY mendapat delapan calon hakim agung dan tiga hakim ad hoc HAM MA. Meski demikian, Amzulian berkata, MA membutuhkan 10 hakim agung dan tiga hakim ad hoc HAM MA. Pasalnya, ada 10 hakim yang akan segera purnabakti. Oleh sebab itu, Amzulian berharap DPR bisa meloloskan semua calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM MA yang diusulkan KY.

"Karena semua proses secara maksimal telah dilakukan Komisi Yudisial dan juga faktor kebutuhan hakim agung di Mahkamah Agung," kata Amzulian.

Sementara itu, Plt. Sekretaris MA Sugiyanto mengatakan, pihaknya sangat memerlukan hakim agung dan hakim ad hoc HAM MA.

Geledah Kantor Kejari Bondowoso, KPK Sita Sejumlah Dokumen

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso. Hal ini terkait kasus suap yang menjerat eks Kepala Kejaksaan Negeri Puji Triasmoro yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Aparat KPK menyita sejumlah dokumen dari kantor Kejari Bondowoso.

"Iya, Informasi yang kami terima, betul, pada (19/11) tim penyidik KPK telah selesai melakukan penggeledahan di Kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso Jawa Timur," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Senin (20/11).

Penggeledahan dilakukan terhadap sejumlah ruangan yang ada di kantor Kejari Bondowoso. Selain itu, pihaknya juga menyita sejumlah dokumen yang kemudian akan dijadikan sebagai barang bukti.

"Penggeledahan dilakukan di beberapa ruangan kerja dan diperoleh dokumen yang terkait perkara yang sedang KPK selesaikan penyidikannya. Segera dari hasil penggeledahan akan dijadikan barang bukti dalam perkara

dimaksud," jelasnya.

Sebelumnya, penyidik KPK telah menetapkan empat tersangka terkait dugaan suap pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso, Jawa Timur. Penetapan tersangka ini merupakan buah dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di Bondowoso pada Rabu 15 November 2023.

Mereka yang ditetapkan tersangka adalah, Kajari Bondowoso Puji Triasmoro, Kaspidus Bondowoso, Alexander Silanc, Pengendali CV Wijaya Gemilang, Yossy S Setiawan, dan Pengendali CV Wijaya Gemilang, Andhika Imam Wijaya. Usai diumumkan sebagai tersangka, mereka pun langsung dilakukan penahanan yang masing-masing selama 20 hari pertama.

"Terhitung mulai 16 November 2023 sampai dengan 5 Desember 2023 di Rutan KPK," kata Deputi Penindakan KPK, Rudi Setiawan saat konfrensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (16/11). • mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



Menhan Prabowo Disebut Berhentikan Pihak yang Diduga Terlibat "Mark Up" di Kemenhan

Prabowo memiliki jejaring luas terhadap produsen alutsista di seluruh dunia sehingga ia sangat mengetahui harga-harga alutsista yang sebenarnya.

JAKARTA (IM) - Menteri Pertahanan (menhan) Prabowo Subianto disebut telah memberhentikan pihak-

pihak yang diduga melakukan upaya tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, upaya korupsi berupa mark up sejumlah pengadaan alutsista bisa di-

hentikan karena Prabowo enggan menandatangani kontrak yang disiapkan.

"Tentu tindakan tegas dari sisi birokrasi, ya tentu Pak Prabowo berhenti," ucap Dahnil di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (18/11) malam.

Meski begitu, Dahnil menyatakan, Kemenhan tak berhak melakukan tindakan hukum. Kewenangan itu berada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung. Namun, ia mengklaim Prabowo sudah melibatkan KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit pengadaan di Kemenhan sebagai langkah preventif pada korupsi.

"Sehingga kalau teman-teman perhatikan banyak sekarang proses belanja di Kementerian Pertahanan itu dipotong. Jadi broker sedemikian rupa tidak diberikan ruang. Sehingga praktek-praktek mark up itu sekarang agak sulit dilakukan," paparnya.

Terakhir, ia menekankan bahwa Prabowo tak bisa di-

POSKO PENGADUAN NETRALITAS TNI PADA PEMILU 2024

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (tengah) didampingi Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo (kiri) dan KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) menyampaikan dalam peresmian Posko Pengaduan Netralitas TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (20/11). Posko tersebut untuk memudahkan pengawasan terhadap netralitas prajurit dan PNS TNI pada Pemilu 2024.

Ganjar: Rasa-rasanya Pilihan Pak JK akan Beda dengan Saya

JAKARTA (IM) - Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, tak mempersoalkan jika Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla, tak memilih dirinya di Pilpres 2024.

Pernyataan ini disampaikan Ganjar dalam konferensi pers usai mengunjungi JK-sebutan untuk Jusuf Kalla --di kediamannya, kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (19/11) sore.

"Tadi beliau sampaikan, pilihan boleh beda, barangkali rasa-rasanya juga, pilihannya Pak JK akan beda dengan saya," kata Ganjar kepada awak media.

Kendati demikian, Ganjar juga masih berharap JK bakal mendukungnya di Pilpres 2024. Respons JK pun menyambut positif namun

dengan canda khasnya.

"Tapi kalau nanti dukung saya juga boleh, Pak," ujar Ganjar kepada JK.

"Aihh, boleh," jawab JK sambil tertawa sembari menepuk pelan punggung Ganjar yang berdiri di sampingnya.

Lantas Ganjar pun bercerita bahwa dalam pertemuan dengan JK, dirinya mendapatkan banyak masukan tentang kepemiluan. Ganjar memandang politikus senior Partai Golkar itu banyak pengalaman.

"Intinya, pemilu musti berjalan dengan baik, nilai persatuan bangsa musti dijaga, saya mengapresiasi beliau (JK)," ujar politikus PDI-P ini.

JK juga memberikan pesan tentang perbedaan

yang menyatukan. JK, menurut Ganjar, tak ingin perbedaan memecah belah bangsa menuju Indonesia emas 2045.

"Kalau selama ini perbedaan ini lima tahunan, kita selalu mempersatukan. Dan kalau kemudian banyak terjadi mozaik-mozaik yang mungkin sulit dipersatukan, inilah momentum untuk rekonsiliasi bangsa. Sekali lagi bangsa," katanya.

Perlu diketahui, JK satu bulan terakhir sibuk menerima kunjungan elite politik nasional. Pada Oktober lalu, JK menerima kunjungan Ketua DPR RI Puan Maharani dan calon presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan. Setiap menerima kunjungan, JK selalu menyambutnya dengan percabangan hangat lebih dari satu jam. • mei



FIRLI BAHURI PENUHI PANGGILAN DEWAS KPK

Ketua KPK Firi Bahuri memasuki mobilnya usai memenuhi panggilan Dewan Pengawas KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK (ACLK), Jakarta, Senin (20/11). Firi Bahuri memenuhi panggilan Dewas KPK untuk mengklarifikasi terkait pertemuannya dengan tersangka dugaan korupsi Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian.

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN	PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN
<p>PT Dana Mobilitas Bersama ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan bahwa akan terjadi pengalihan terhadap sebagian besar saham di dalam Perseroan sehingga menyebabkan perubahan pendendalian dalam Perseroan ("Pengambilalihan").</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT"), para pihak yang berkepentingan, termasuk para kreditor yang keberatan atas Pengambilalihan tersebut dapat menyampaikan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat di bawah ini:</p> <p>PT Dana Mobilitas Bersama Gedung Treasury Tower - Lantai 33 District 8 SCBD, Lot 28 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta Selatan 12190</p> <p>Apabila dalam jangka waktu tersebut para pihak yang berkepentingan tidak mengajukan keberatan, maka para pihak yang berkepentingan dianggap telah menyetujui Pengambilalihan tersebut.</p> <p>Pengumuman ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam Pasal 127 UUPU.</p> <p>Jakarta, 21 November 2023 PT Dana Mobilitas Bersama Direksi</p>	<p>PT Investasi Kreasi Bangsa ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan bahwa akan terjadi pengalihan terhadap sebagian besar saham di dalam Perseroan sehingga menyebabkan perubahan pendendalian dalam Perseroan ("Pengambilalihan").</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT"), para pihak yang berkepentingan, termasuk para kreditor yang keberatan atas Pengambilalihan tersebut dapat menyampaikan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat di bawah ini:</p> <p>PT Investasi Kreasi Bangsa Gedung Treasury Tower - Lantai 33 District 8 SCBD, Lot 28 Jalan Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta Selatan 12190</p> <p>Apabila dalam jangka waktu tersebut para pihak yang berkepentingan tidak mengajukan keberatan, maka para pihak yang berkepentingan dianggap telah menyetujui Pengambilalihan tersebut.</p> <p>Pengumuman ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam Pasal 127 UUPU.</p> <p>Jakarta, 21 November 2023 PT Investasi Kreasi Bangsa Direksi</p>

Firi Bahuri Diperiksa Dewas KPK soal Pemerasan Terhadap SYL

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firi Bahuri telah selesai rampung diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Ia diperiksa selama 3 jam.

Berdasarkan pantauan di gedung Dewas KPK, Firi Bahuri diperiksa mulai pukul 10.08 WIB. Kemudian, ia keluar dari gedung Dewas KPK sekira pukul 13.05 WIB. Saat ke luar, Firi Bahuri tampak dikawal sejumlah ajudannya.

Kepada wartawan ia mengaku sudah memberikan klarifikasi seluruhnya kepada pihak Dewas dari awal sampai akhir.

"Seputar laporan yang diterima oleh Dewas. Saya memberikan semuanya apa yang diminta oleh Dewan Pengawas. Tentu ini sesuai undangan klarifikasi dari Dewas dan semuanya saya sampaikan

semua utuh dari A sampai Z," kata Firi usai memberikan klarifikasi kepada Dewas KPK, Senin (20/11).

Lebih lanjut, ia mengaku tak bisa menceritakan seluruhnya terkait materi yang disampaikan. Ia mengatakan pihak Dewas KPK yang akan memberikan pernyataan lengkap.

"Sedangkan kan materinya karena sifat pemeriksaan di Dewas tertutup, nanti biarlah Dewas menyampaikan lengkap," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Firi Bahuri dilaporkan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan pertemuan dirinya bertemu dengan mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Laporan tersebut dibuat oleh Komite Mahasiswa Peduli Hukum.

"Jadi kami dari Komite Mahasiswa Peduli Hukum hadir di Gedung KPK membuat laporan pengaduan masyarakat yang kami tunjukkan kepada Dewan Pengawas KPK. Kami ingin melaporkan laporan kepada Bapak Firi Bahuri atas dugaan pelanggaran etik," ujar Koordinator Komite Mahasiswa Peduli Hukum, Febrianes saat dihubungi, Jumat (6/10).

Febrianes menjelaskan, laporannya tersebut merujuk pada Peraturan Dewas KPK Nomor 3 Tahun 2021. Di sana termaut aturan soal larangan tiap insan KPK bertemu dengan pihak yang berkeperka di KPK.

"Di Pasal 4 mengatakan tiap insan komisi KPK dilarang mengadakan pertemuan langsung atau tidak langsung dengan tersangka terdakwa terpidana atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK," jelasnya. • han